

BAB I

PENDAHULUAN

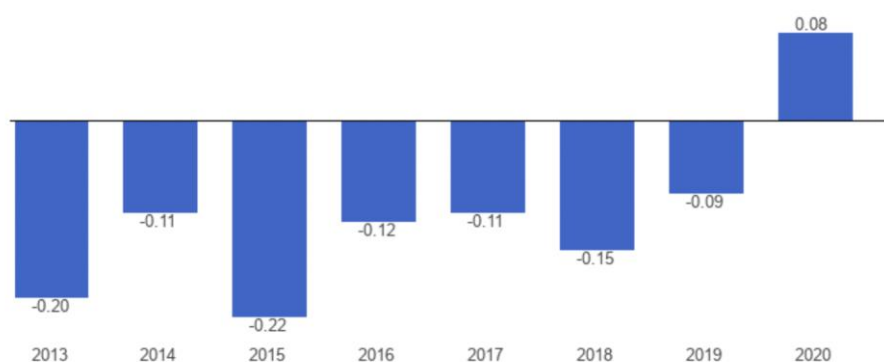
1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, sejumlah besar data diproduksi oleh berbagai lembaga atau organisasi, baik swasta maupun pemerintahan. Volume data yang sangat besar ini menimbulkan tantangan baru di berbagai perspektif terhadap suatu data, seperti arsitektur data, pengelolaan data, dan operasional data. Saat ini, data-data tersebut bukan hanya menjadi suatu data pasif yang menyimpan informasi, melainkan data aktif atau *hot data* yang dijadikan sebagai suatu alat pengambilan keputusan di organisasi swasta dan menjadi alat pertimbangan dibuatnya kebijakan publik oleh organisasi pemerintahan [2]. Sudah tentu bahwa pengelolaan terhadap *volume* data, validitas data, aliran data, dan *veracity* data menjadi urgensi di berbagai organisasi [3].

Manajemen data menjadi salah satu komponen krusial bagi pemerintah, tidak dapat dipungkiri proses ini mengharuskan setiap data yang masuk ke pemerintah diproses, diolah dan disimpan untuk keperluan dalam sebuah organisasi [4]. Penerapan tata kelola dapat membantu organisasi dalam menyelenggarakan manajemen data yang berpedoman kepada standar untuk memastikan sesuai dengan undang-undang, ataupun peraturan [5]. Tata Kelola merupakan pengelolaan data yang meliputi aturan, prosedur, kebijakan, peran dan tanggung jawab untuk memastikan asset data yang di hasilkan akurat, konsisten, dan tersedia. Adapun apabila tata kelola data yang tidak diterapkan dengan baik dapat berdampak pada organisasi sehingga muncul risiko yang mengakibatkan masalah pada organisasi [6].

Indonesia telah menyadari akan keterbukaan data publik yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan manajemen data sejak tahun 2004. Perjalanan panjang akan keterbukaan data atau *open data* terus berlangsung hingga tahun 2014. Di mana di tahun tersebut merupakan kelahiran dari *e-government* di Indonesia yang membuat semua mata tersadar, baik pemerintah maupun masyarakat, akan kebutuhan data dan tata kelola data yang baik dan dapat dipercaya [7]. Dilansir dari theglobaleconomy.com yang mendata performa suatu negara dari berbagai aspek di

seluruh dunia, dapat dilihat suatu indikator *Regulatory Quality*. Indikator tersebut menunjukkan performa pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan berbagai kebijakan dan penghimpunan data masyarakat. Kriteria yang digunakan cukup sederhana, yaitu antara rentang nilai minus yang merepresentasikan kualitas buruk dan rentang nilai plus yang merepresentasikan kualitas baik. Menurut sumber tersebut, pada rentang 2013 sampai 2020, *Regulatory Quality* di Indonesia relatif belum memuaskan, kecuali di tahun 2020 di mana terdapat peningkatan yang signifikan walaupun nilai masih relatif rendah, yaitu di angka 0.08. Hal ini menjadi catatan penting dalam penelitian ini [8].



Gambar 1.1 Regulatory Quality di Indonesia pada tahun 2013 - 2020

Di Indonesia, pun begitu di seluruh negara di dunia, memiliki suatu organisasi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Sebagaimana dalam salah satu agenda pemerintah untuk mengentaskan jurang kemiskinan melalui bantuan-bantuan sosial, maka terdapat suatu organisasi di berbagai tingkat pemerintahan, yang disebut dengan Dinas Sosial, dan salah satunya adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dibidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsetrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Adapun Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Pengendalian dan Pengawasan pada program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berada dibawah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin

Kesos) mengembangkan Aplikasi Sistem informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG). Aplikasi SIKS-NG adalah aplikasi yang berbasis web yang digunakan untuk mengelola data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi data bantuan sosial, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [9].

Pada dasarnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menerima data dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Aplikasi SIKS-NG. Data tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan oleh berbagai instansi atau organisasi untuk beragam tujuan terutama untuk terpenuhinya kesejahteraan sosial masyarakat khususnya di Jawa Barat. Tujuan dari penggunaan data tersebut kepada organisasi atau instansi yang memiliki kepentingan sesuai dengan kebutuhannya perlu memperoleh informasi yang akurat dan cepat agar tujuannya dapat tercapai dengan baik.

Kebutuhan Instansi ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai program yang dijalankan pada Instansi ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun setelah berjalannya pengelolaan data dan peran Dinas Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugasnya sebagai pengawasan dan pengendalian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengetahui sejauh mana tugas tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya, data tersebut dibutuhkan untuk keperluan yang dapat menunjang visi dan misi agar meningkatnya proses pelayanan kebutuhan informasi dan data baik di lingkungan internal maupun eksternal. Adapun hal tersebut menjadi acuan untuk melakukan evaluasi dalam mengetahui tingkat layanan manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam menentukan faktor yang dapat menelusuri hambatan serta progress lingkup operasional yang sedang berjalan melalui tata kelola data sesuai standar.

Oleh karena itu, adanya audit untuk menentukan kinerja manajemen data yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sehingga dapat mendorong meningkatnya tata kelola data terhadap manajemen data berupa inisiatif jangka panjang dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk dapat memberikan tolak ukur atau perspektif lain untuk dapat melakukan perubahan dimasa yang akan datang [10],[11]. Audit tersebut akan dilakukan menggunakan

Data Management Body of Knowledge (DMBoK) sebagai kerangka kerja serta menggunakan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)*. *Data Management Body of Knowledge (DMBoK)* memberikan pendekatan membantu organisasi membangun, meningkatkan, dan mengukur kemampuan manajemen data perusahaan mereka yang memungkinkan data tepat waktu, akurat, dan dapat diakses di seluruh organisasi [10],[12],[11]. Sedangkan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja proses manajemen data dari sistem atau organisasi dari sudut pandang manajemen TI dan efektif dimasa yang akan datang [13],[14]. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan-perbaikan agar dasar penerimaan bantuan sosial untuk berbagai kegiatan program bantuan sosial Kementerian Sosial RI tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Diharapkan dengan adanya evaluasi kinerja tata kelola DTKS ini dapat memberikan peningkatan kualitas, ketersediaan, dan pelayanan pemanfaatan data untuk memberikan rekomendasi mekanisme tata kelola data terhadap kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul pada penelitian ini terkait dengan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala data yang dialami terkait dengan validitas data dari berbagai proses tata kelola data dimulai dari tahap pengumpulan data, penyimpanan data, hingga pengambilan keputusan yang didasari atas data yang tersimpan.
- 2) Kendala terkait menentukan ketetapan sasaran untuk intervensi karena terdapat data yang dihilangkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang ada, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana manajemen pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah diterapkan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?

- 2) Bagaimana menentukan tingkat *Maturity Level* dan rekomendasi manajemen data terhadap pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilingkunga Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menggunakan dasar kerangka kerja *Data Management Body of Knowledge (DMBoK)* dan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian thesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan analisa manajemen pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah diterapkan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- 2) Mengetahui tingkat *Maturity Level* dan menghasilkan rekomendasi manajemen data terhadap pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menggunakan dasar Kerangka Kerja *Data Management Body of Knowledge (DMBoK)* dan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua mengenai kegunaan pengembangan ilmu dan kegunaan operasional, sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Adapun kegunaan pengembangan ilmu sebagai:

- 1) Memberikan *state of the art* mengenai penerapan Analisis *Maturity* dengan *framework Data Management Body of Knowledge (DMBoK)* dan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- 2) Memberikan evaluasi kinerja kondisi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat saat ini untuk proses pengelolaan manajemen DTKS.
- 3) Dapat memberikan rekomendasi manajemen data untuk Dinas Provinsi Jawa Barat menggunakan analisis *maturity* dengan *framework Data Management Body of Knowledge (DMBoK)* dan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)*, sehingga dapat memudahkan organisasi di masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Operasional

Dalam proses audit manajemen data di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tujuan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memberikan layanan terbaik sehingga memiliki strategi mengenai perencanaan pengelolaan data. Dengan begitu, dapat memudahkan dalam melakukan penentuan kebijakan yang dapat diterapkan untuk dipatuhi agar dapat mendukung kegiatan proses tata kelola data.

1.6 Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada thesis ini dibatasi beberapa hal, antara lain:

- 1) Data dan informasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- 2) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat hanya memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengawas dan Pengendalian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 3) Perancangan tata kelola data menggunakan metode analisis *Maturity* dengan *framework Data Management Body of Knowledge (DMBoK)* dan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan hasil penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai definisi dan teori-teori yang digunakan sebagai acuan atau dasar dalam penelitian seperti pengertian tata kelola data, model kerangka kerja tata kelola data, *Capability Maturity Model Integration (CMMI)*, *DAMA-DMBoK*, *Analysis Gap* dan, kerangka pemikiran / alur (*roadmap*).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian yang mencakup kerangka kerja penelitian, metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian baik data utama, hasil analisis dan data penunjang yang memperkuat hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas permasalahan tujuan penelitian.